

Dinamika Gerakan Transnasionalisme Islam: Pengaruh Kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Terhadap Identitas Nasional

Tarissa Nandari¹, Maulidah Fitriah², Bimo Putra Bayu³, Aniqotul Ummah⁴

^{1,2,3,4}Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,
Jalan RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Depok, Jawa Barat, 12450

2110413016@mahasiswa.upnvj.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika gerakan transnasionalisme Islam dengan menyoroti pengaruh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap identitas nasional Indonesia. HTI, yang berideologi fundamentalis, berambisi mendirikan khilafah Islamiyah dan menentang sistem politik berbasis Barat, sehingga menimbulkan konflik dengan pemerintah dan dianggap mengancam keamanan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk memahami strategi HTI dalam merekrut pengikut, transformasi gerakan pasca-dibubarkan, dan dampak ideologi khilafah terhadap identitas nasional. Dengan menggunakan konsep transnasionalisme dan identitas nasional sebagai landasan teori, makalah ini mengeksplorasi bagaimana HTI menggunakan sosialisasi, kaderisasi, dan teknologi komunikasi untuk mempertahankan pengaruhnya, serta bagaimana gerakan ini beradaptasi menjadi entitas online setelah pembubaran resmi oleh pemerintah pada tahun 2017. Selain itu, dibahas pula bagaimana ideologi khilafah yang dianut HTI berpotensi mengancam keragaman budaya dan konsep negara bangsa Indonesia. Penelitian ini mengandalkan analisis literatur yang mencakup jurnal dan artikel terkait HTI, transnasionalisme Islam, dan radikalisme, serta mempertimbangkan peran aktor non-negara dalam hubungan internasional.

Kata kunci: Transnasionalisme Islam, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Identitas Nasional, Radikalisme

ABSTRACT

This research aims to examine the dynamics of the Islamic transnationalism movement by highlighting the influence of Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) on Indonesia's national identity. HTI, which has a fundamentalist ideology, has the ambition to establish an Islamic caliphate and opposes the Western-based political system, thus causing conflict with the government and being considered a threat to national security. This research aims to understand HTI's strategy in recruiting followers, the transformation of the movement after its dissolution, and the impact of the caliphate ideology on national identity. Using the concepts of transnationalism and national identity as a theoretical basis, this paper explores how HTI uses socialization, cadre formation and communication technology to maintain its influence, as well as how this movement adapted to become an online entity after its official dissolution by the government in 2017. In addition, it also discusses how the caliphate ideology adopted by HTI has the potential to threaten cultural diversity and the concept of the Indonesian nation state. This research relies on literature analysis that includes journals and articles related to HTI, Islamic transnationalism, and radicalism, and considers the role of non-state actors in international relations.

Keywords: Islamic Transnationalism, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), National Identity, Radicalism

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Gerakan Islam Transnasionalisme merupakan suatu kelompok islam yang memiliki ideologi, pemahaman, atau keinginan yang sama dan bergerak lintas negara. Gerakan ini meyakini adanya konsep ummah dan persaudaraan antara sesama muslim di berbagai belahan dunia (Binder, 2009). Kelompok ini dipahami sebagai kelompok yang memandang agama sebagai scripture (kitab suci), atau bahkan pemahaman islam yang bersifat fundamentalis. Dengan adanya infrastruktur serta globalisasi, gerakan ini pada akhirnya semakin mudah untuk terikat antara satu dengan lainnya di berbagai negara dunia. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa gerakan islam transnasional bersifat transnasional atau lintas negara, ideologi gerakan ini tidak lagi bertumpu pada konsep *nation-state* melainkan konsep umat, corak pemahaman gerakan ini bersifat skripturalis, fundamentalisme, atau radikal, dan juga secara parsial gerakan ini mengadaptasi berbagai gagasan dan instrumen modern. Beberapa sumber mengatakan bahwa gerakan Islam Transnasionalis merupakan bentuk perlawanan serta kekhawatiran yang berasal dari kalangan ulama islam yang berada di Timur Tengah atas kolonisasi bangsa Eropa di berbagai negara di kawasan Asia yang mayoritas penduduknya memeluk agama islam.

Sejak kemerdekaan bangsa Indonesia, pada kenyataannya telah banyak muncul gerakan-gerakan islam transnasionalis yang telah berhasil untuk tumbuh serta berkembang di negara ini. Seiring dengan bergulirnya era reformasi politik di negara kita yaitu sekitar tahun 1998, gerakan ini semakin masif dan berani untuk menunjukkan eksistensinya kepada masyarakat umum, munculnya gerakan ini sering ditandai dengan adanya kekerasan, pengkafiran kepada sesama muslim, pemaksaan keyakinan, serta perubahan dalam pola perilaku agama dan ideologi. Salah satu contoh gerakan islam transnasionalisme yang telah masuk dan berkembang di Indonesia adalah Hizbut Tahrir (HT). Hizbut Tahrir (HT) merupakan gerakan transnasional islam yang berkembang pesat dengan keinginan untuk mendirikan kembali khilafah Islamiyah karena gerakan ini menilai lemahnya umat islam adalah karena runtuhnya khilafah islamiyah di Turki. Kelompok ini berkembang di berbagai wilayah seperti Timur

Tengah, Asia Tengah, Asia Selatan, Eropa, Amerika, Australia, serta Asia Tenggara (Hanif, 2014). Pendiri dari kelompok ini adalah Taqiyyuddin An Nabhani yang berasal dari Palestina, Taqiyyuddin An Nabhani sendiri merupakan seorang ulama besar serta berpengaruh di Palestina pada zaman itu. Baginya jika umat muslim di Palestina dapat bersatu maka akan mudah untuk merebut kembali tanah mereka, sehingga di tahun 1953 dirinya mendirikan Hizbut Tahrir (HT) di al-Quds, Yerusalem. Disebutkan bahwa Hizbut Tahrir merupakan gerakan politik yang menolak adanya demokrasi, dan berfokus kepada bagaimana untuk mendirikan kembali kekhilafahan di muka bumi, dengan begitu hal ini menimbulkan banyak konflik, terutama dengan negara-negara yang menganut sistem *nation-state*. Dengan demikian Hizbut Tahrir dianggap merusak nasionalisme kebangsaan dari masyarakat suatu negara, sehingga kelompok ini dilarang masuk di berbagai negara seperti negara Libya, Mesir, Rusia, Bangladesh, bahkan di Indonesia sekalipun Hizbut Tahrir ini telah dilarang.

Dalam kasus Indonesia, kelompok Hizbut Tahrir ini tergolong sebagai gerakan baru, karena kelompok ini berdiri di negara Indonesia ataupun muncul sebagai sebuah organisasi yaitu baru pada saat setelah terjadinya reformasi. Tetapi sebenarnya gerakan ini telah muncul di Indonesia berawal dari para aktivis masjid kampus di Mesjid Al-Ghifari, IPB Bogor sekitaran tahun 1982. Dibentuk untuk kemudian melakukan halaqah-halaqah (pengajian kecil) untuk mengeksplorasi serta menyebarluaskan gagasan-gagasan dari kelompok Hizbut Tahrir (HT). Kelompok Hizbut Tahrir ini telah mengadakan suatu konferensi internasional terkait khilafah islamiyah yang pelaksanaannya digelar di Istora Senayan pada tahun 2002, sehingga dengan adanya konferensi ini menandakan lahirnya organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Organisasi ini secara langsung memproklamkan diri mereka sebagai sebuah partai politik yang berideologi islam, tetapi menolak untuk bergabung dengan sistem politik yang ada di negara Indonesia. Seiring berjalannya waktu, Pemerintah Indonesia menganggap bahwa organisasi ini bertentangan dan tidak sejalan dengan Pancasila serta UUD 1945, karena Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai ormas yang berbadan hukum dinilai

telah menimbulkan suatu benturan keras di masyarakat yang hal tersebut dapat mengancam keamanan, ketertiban, serta membahayakan keutuhan dan identitas nasional NKRI.

HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia dikenal sebagai salah satu contoh dari gerakan transnasionalisme islam yang ada di Indonesia. kehadiran HTI pada kenyataannya menimbulkan turbulensi yang negatif kepada pemerintah Indonesia. Hal ini dikarenakan HTI sendiri disebut sebagai gerakan atau kelompok yang berambisi untuk mendirikan negara islam (Khilafah Islamiyah) diseluruh belahan dunia yang berpatokan penuh pada aqidah islam. Akan tetapi, cara-cara yang dilakukan oleh HTI dapat dikatakan cukup radikal. Kemudian, terdapat perbedaan yang sangat mencolok dari visi misi HTI dengan pemerintah. Mereka sangat menolak untuk menerima pelaksanaan sistem politik yang berakar dari Barat, karena dipandang sekuler, disebut sebagai sumber dari berbagai perkara, tidak sesuai dengan syariat dan aqidah islam serta dinilai kufur. Mereka menolak dengan tegas pelaksanaan demokrasi, nasionalisme, kedaulatan rakyat, dan lain sebagainya.

Sedangkan, HTI sendiri ingin menyinambungkan kehidupan berintikan pada ajaran islam yang murni dan menganggap pandangan atau paham lainnya itu sesat dan mereka juga menginginkan untuk terus menyambungkan dakwah ke seluruh penjuru dunia. Sehingga, HTI yang selalu menggaungkan ideologinya dan berusaha menyebarluaskan pola pemikiran tersebut kepada pemerintah dan juga masyarakat, membuat HTI dengan pemerintah kerap kali bersitegang. Tentu hal ini akan sangat mengancam keamanan, kedaulatan, keutuhan dan persatuan bangsa dan dapat pula berimplikasi pada keteguhan identitas nasional yang telah lama terdesain dengan sedemikian rupa melalui sejarah dan perjuangan yang sangat panjang. Maka dari itu, penulis akan mengulas lebih lanjut mengenai seluk beluk Hizbut Tahrir di Indonesia. Serta, kelompok kami akan menelisik lebih jauh mengenai pengaruh dari keberadaan gerakan islam transnasionalisme seperti HTI terhadap kekukuhan identitas nasional bangsa Indonesia.

Landasan Teori Transnasionalisme

Transnasionalisme merupakan sebuah istilah dalam ilmu sosial yang digunakan untuk menggambarkan fenomena meningkatnya integrasi individu, kelompok, institusi, dan mobilitas yang melintasi batas negara. Konsep ini muncul seiring dengan perkembangan globalisasi dan peningkatan keterhubungan antara manusia dan masyarakat di seluruh dunia (P., & Waworuntu, A. 2019). Secara definisi, transnasionalisme merujuk pada serangkaian hubungan dan interaksi yang terjadi antara individu dan kelompok yang melampaui batas-batas negara. Dalam konteks ini, terjadi peningkatan integrasi fungsi dan proses yang terkait dengan batasan dan hubungan lintas negara. Melalui transnasionalisme, individu dan kelompok dapat dengan mudah berinteraksi, saling bertukar ide, barang, dan bahkan melakukan perpindahan fisik melintasi wilayah. Salah satu aspek yang terkait dengan transnasionalisme adalah transnasionalisme kapitalis. Konsep ini mengacu pada pergerakan orang, ide, dan barang yang melintasi berbagai wilayah. Para pendukung transnasionalisme kapitalis meyakini bahwa fenomena ini sejalan dengan pertumbuhan yang cepat dalam globalisasi kapitalis. Mereka berpendapat bahwa batasan-batasan negara tidak lagi relevan dalam hal pergerakan tenaga kerja, perusahaan global, aliran uang global, transfer informasi global, dan kerjasama ilmiah yang melintasi batas-batas negara. Selain itu, transnasionalisme juga melibatkan peran aktor non-negara dalam hubungan internasional. Aktor non-negara ini dapat berupa organisasi seperti Jaringan Advokasi Transnasional (TAN) dan Gerakan Sosial Transnasional (TSM). Peran mereka sangat penting dalam membentuk norma-norma global dan memperjuangkan perubahan sosial yang melintasi batas negara. Aktor non-negara ini memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan dan tindakan di tingkat internasional, serta memobilisasi dukungan untuk isu-isu yang melibatkan masalah lintas batas negara.

Identitas Nasional

Konsep identitas nasional berasal dari kombinasi istilah "identitas" dan "nasional". Identitas mengacu pada kualitas, tanda, atau atribut yang berbeda yang diasosiasikan dengan individu atau objek yang membedakannya dengan yang lain (ICCE, 2005: 23). Sebaliknya,

istilah "nasional" menunjukkan afiliasi dengan kolektif yang lebih luas yang disatukan oleh karakteristik bersama, termasuk aspek-aspek yang dapat dilihat seperti budaya, agama, dan bahasa, serta aspek-aspek yang tidak dapat dilihat seperti aspirasi, prinsip, dan tujuan. Konsep identitas nasional mengarah pada tindakan kolektif yang bercirikan ciri-ciri nasional, yang diekspresikan melalui pembentukan organisasi atau gerakan yang berkarakteristik nasional (ICCE, 2005: 25).

Menurut Kaelan (2007), identitas nasional adalah ekspresi dari nilai-nilai budaya yang muncul dan berkembang dalam berbagai bagian dari eksistensi sebuah bangsa, yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain. Nilai-nilai budaya yang ada di suatu negara dan diekspresikan dalam identitas nasionalnya tidak bersifat pasti atau kaku secara normatif dan dogmatis. Sebaliknya, nilai-nilai tersebut merupakan entitas yang terus berkembang dan meluas sebagai hasil dari keinginan masyarakat untuk maju. Oleh karena itu, identitas nasional dapat didefinisikan ulang untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya yang berkelanjutan dalam kondisi masyarakat kontemporer yang dinamis. Identitas nasional adalah konsep yang berubah-ubah yang mengalami rekonstruksi atau dekonstruksi secara terus menerus sebagai respons terhadap peristiwa-peristiwa historis.

Rumusan Masalah

HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia dikenal sebagai salah satu contoh dari gerakan transnasionalisme islam yang ada di Indonesia. kehadiran HTI pada kenyataannya menimbulkan turbulensi yang negatif kepada pemerintah Indonesia. Hal ini dikarenakan HTI sendiri disebut sebagai gerakan atau kelompok yang berambisi untuk mendirikan negara islam (Khilafah Islamiyah) diseluruh belahan dunia yang berpatokan penuh pada aqidah islam. Akan tetapi, cara-cara yang dilakukan oleh HTI dapat dikatakan cukup radikal. Kemudian, terdapat perbedaan yang sangat mencolok dari visi misi HTI dengan pemerintah. Mereka sangat menolak untuk menerima pelaksanaan sistem politik yang berakar dari Barat, karena dipandang sekuler, disebut sebagai sumber dari berbagai perkara, tidak sesuai dengan syariat dan aqidah islam serta dinilai kufur. Mereka menolak dengan tegas pelaksanaan demokrasi, nasionalisme, kedaulatan rakyat, dan lain sebagainya.

Sedangkan, HTI sendiri ingin menyinambungkan kehidupan berintikan pada ajaran islam yang murni dan menganggap pandangan atau paham lainnya itu sesat dan mereka juga menginginkan untuk terus menyebarkan dakwah ke seluruh penjuru dunia. Sehingga, HTI yang selalu menggaungkan ideologinya dan berusaha menyebarkan pola pemikiran tersebut kepada pemerintah dan juga masyarakat, membuat HTI dengan pemerintah kerap kali bersitegang. Tentu hal ini akan sangat mengancam keamanan, kedaulatan, keutuhan dan persatuan bangsa dan dapat pula berimplikasi pada keteguhan identitas nasional yang telah lama terdesain dengan sedemikian rupa melalui sejarah dan perjuangan yang sangat panjang. Maka dari itu, kelompok kami akan mengulas lebih lanjut mengenai seluk beluk Hizbut Tahrir di Indonesia. Serta, kelompok kami akan menelisik lebih jauh mengenai pengaruh dari keberadaan gerakan islam transnasionalisme seperti HTI terhadap kekukuhan identitas nasional bangsa Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang akan digunakan penulis untuk mengkaji penelitian ini adalah dengan menggunakan desain ataupun metode penelitian kualitatif deskriptif. Kualitatif itu sendiri merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan seorang peneliti dalam mengamati atau meneliti suatu objek alamiah tertentu. Objek dalam jenis penelitian kualitatif ini merupakan sebuah objek yang alamiah, apa adanya, tidak dimanipulasi dalam kondisi apapun sehingga pada akhirnya metode ini disebut juga dengan deskriptif karena hal ini bertujuan untuk mendeskripsikan suatu masalah sebagaimana adanya. Selaras dengan pendapat yang dikatakan oleh Sugiyono (2017), bahwa jenis penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan dalam meneliti suatu objek alamiah, dan dalam hal ini peneliti merupakan instrumen penting karena akan menganalisis dan mendalami objek tersebut. Selanjutnya metode deskriptif merupakan satu metode penelitian yang menunjukkan atau memperlihatkan karakteristik populasi ataupun fenomena tertentu yang tengah peneliti kaji. Fokus utama dalam metode penelitian deskriptif adalah untuk menjelaskan terkait objek penelitian maupun jawaban atas sebuah

peristiwa atau fenomena yang sedang terjadi saat itu, fenomena atau peristiwa yang dimaksud dalam hal ini merupakan topik atau objek penelitian seorang peneliti. Tentunya hasil dari penelitian deskriptif merupakan gambaran mendetail terkait suatu masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan sebuah teknik dalam melakukan pengumpulan data yang menggunakan berbagai macam literatur ataupun kepustakaan baik berupa buku, jurnal, ataupun catatan yang berasal dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Menurut Khatibah (2011), studi kepustakaan merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dalam melakukan pengumpulan, pengolahan, ataupun penyimpulan data dengan menggunakan teknik seperti mengumpulkan karya tulis, buku, jurnal, yang relevan dengan penelitian yang ingin diteliti dengan tujuan untuk mencari jawaban ataupun memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya memerlukan suatu pemahaman yang mendalam dan juga kritis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi yang Digunakan Oleh kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Dalam Memperoleh dan Mempertahankan Basis Pengikutnya Serta Analisis Respon Pemerintah Dalam Menghadapi Persoalan Tersebut

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan kelompok yang menginginkan negara ini dapat menerapkan syariat islam sesuai dengan ajarannya, untuk mewujudkan cita-citanya tersebut yaitu khilafah islamiyah kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) selalu menampilkan keberadaannya secara halus agar diterima oleh masyarakat, kelompok ini memiliki beberapa metode perjuangan untuk dapat menarik simpati masyarakat dengan 3 tahapan yaitu: sosialisasi, kaderisasi, dan merebut kekuasaan (Hayati, 2017). Di tahapan pertama, sebelum memulai kaderisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) akan lebih dulu

melakukan kegiatan sosialisasi secara halus melalui serangkaian dakwah, pengajian, seminar, bedah buku islam agar masyarakat tidak memiliki kecurigaan dan untuk membuat masyarakat terus berkeinginan datang ke acara-acara tersebut, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) akan memberikan sebuah bingkisan di akhir acaranya seperti membagikan sajadah, makanan, atau hal lain. Selain itu anggota dari kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ini akan meminta kontak yang dapat dihubungi oleh mereka untuk mengabarkan jika suatu saat kelompok ini akan melakukan acara-acara lain, maka masyarakat yang sempat datang diharapkan untuk datang kembali, dengan begitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) akan semakin mudah untuk membuat kedekatan yang perlahan namun pasti kedekatan ini akan dimanfaatkan melalui serangkaian acaranya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Kelompok ini akan memulai untuk memasukan serta menyebarkan paham-paham mereka terkait bagaimana seharusnya negara ini dijalankan dengan paham keislaman yang mereka anut. Karena kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sangat mengandalkan dari adanya teknologi komunikasi, mereka memanfaatkan hal ini untuk menanyakan kepada bakal calon anggotanya dengan melontarkan pertanyaan seperti 'jika diminta untuk memilih antara islam dan Pancasila, manakah yang kamu pilih?' Lantas jika seseorang itu menjawab lebih memilih islam, maka tingkatan selanjutnya yaitu kaderisasi akan dilanjutkan.

Masa kaderisasi dalam HTI ini kemudian dilakukan melalui 4 tahapan, yaitu; tahapan pertama merupakan saat bakal kader masih berada di dalam kekaburan pikiran terkait islam dan pengetahuannya tentang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dalam tahapan ini anggota HTI akan lebih dalam memperkenalkan tentang visi misi serta latar belakang HTI. Tahapan kedua merupakan sosialisasi dan rekrutmen organisasi, dalam masa ini HTI akan menyampaikan ide-idenya secara terbuka seperti mengapa negara ini dalam menerapkan prinsip demokrasi Pancasila, tetapi masih saja terbelenggu oleh kekejaman yang diciptakan oleh para penguasa, maka HTI akan menjawab dengan idenya yaitu sudah seharusnya ideologi negara ini diganti dengan paham islam. Ketiga adalah masa perkaderan, mereka yang telah menerima

paham-paham serta gagasan HTI, selanjutnya dapat menjalani proses perkaderan. Tujuan utama dari perkaderan ini adalah untuk membangun dan memperkuat kerangka pemikiran, memperbanyak pendukung, dan juga melahirkan sebuah kepribadian islam dikalangan para pengikutnya. Tahapan terakhir adalah masa menegakkan organisasi secara intensif, maka anggota-anggota baru ini dianggap telah sah menjadi bagian dari kelompok HTI dan dianggap telah siap untuk melanjutkan perjuangan HTI dalam mencapai keinginannya yaitu membangun negara Islam. Cara lain yang dimanfaatkan kelompok HTI untuk dapat merekrut semakin banyak anggota ialah dengan menyasar kalangan anak muda melalui kampus, karena bagi HTI mahasiswa merupakan instrumen paling penting dalam menyebarluaskan paham, gagasan, serta ide-idenya secara cepat. Faktanya memang kebanyakan dari kader HTI ialah berasal dari kalangan anak muda yang terdidik seperti mahasiswa. Kebanyakan dari mahasiswa tersebut adalah mahasiswa yang tidak mengenyam pendidikan agama yang kuat, maka akan mudah bagi HTI untuk menjadikan hal ini sebagai sebuah objek doktrinisasi pemikiran keagamaan kelompok HTI, yang memiliki orientasi pada politik kekuasaan model khilafah islamiyah.

Selanjutnya dalam rangka untuk menjaga kesetiaan di antara para anggota serta simpatisannya, kelompok HTI ini secara rutin akan menggelar berbagai acara untuk menggambarkan fikrah serta thariqahnya, seperti mengadakan pertemuan untuk memperkuat pandangan terkait islam yang dipahami oleh HTI dibalut dalam bentuk sebuah pengajian, selanjutnya HTI juga sering kali melakukan demonstrasi dengan tujuan yaitu untuk menunjukkan kekuatan politiknya dengan cara memihak masyarakat serta menggiring masyarakat kepada konsep penawaran khilafah yang dinilai sangat tepat sebagai jawaban atas kegagalan dari pelaksanaan sistem politik dan ekonomi sekarang ini. Selain itu kelompok HTI ini juga sangat memanfaatkan jaringan teknologi komunikasi dalam melakukan diskusi, tukar pemikiran dan pemahaman mengenai gagasan-gagasan kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) juga menyusun cara untuk dapat menggaet lebih banyak lagi masyarakat agar tergabung ke dalam kelompok mereka.

Meskipun kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ini telah mendapatkan status sebagai Badan Hukum Perkumpulan di tanggal 2 Juli 2014 silam, dan secara tertulis dalam AD/ART nya mencantumkan Pancasila sebagai landasan ideologi Badan Hukum Perkumpulannya, tetapi pada kenyataannya kegiatan kelompok ini sangat bertentangan dengan kelima dasar dalam pancasila. Tercatat bahwa di tahun 2015, HTI telah melakukan kegiatan Rapat dan Pawai Akbar di Gelora Bung Karno dengan dihadiri sebanyak ratusan ribu simpatisan kelompok tersebut, pemimpin narasi dalam acara tersebut secara berulang kali mengatakan kalimat seperti berikut “Masihkah kita percaya pada demokrasi? Masihkan kita berharap pada demokrasi? Menegakkan hukum khilafah adalah sebuah kewajiban bagi bangsa Indonesia, maka cabut seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan syariah. Hancurkan sekat-sekat nasionalisme, ubah kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan di tangan Allah.” Maka secara jelas bahwa HTI telah menganut, mengembangkan, dan juga menyebarluaskan ajaran ataupun pemahaman yang bertentangan dengan dasar negara kita yaitu Pancasila. Sehingga untuk meredam, membungkam, dan menghentikan kegiatan yang lambat laun dapat mengancam keamanan, ketertiban, dan kesatuan nasional pada akhirnya Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM mencabut SK Badan Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada 19 Juli 2017. Terbitnya SK pencabutan ini didasari pada Pasal 80A Perppu No. 2 Tahun 2017, yang dalam peraturan tersebut mengatur bentuk penindakan serta sanksi yang akan diberikan kepada perkumpulan ataupun ormas yang melakukan upaya maupun aktivitas yang bertolak belakang dengan ideologi pancasila serta NKRI (BBCnews.com). Sehingga secara sah dapat dikatakan bahwa HTI telah dibubarkan oleh negara maka segala bentuk aktivitas yang nantinya masih dijalankan oleh kelompok tersebut akan dapat dikenakan pidana jika terbukti melanggar dan mencederai dasar negara yaitu Pancasila.

Transformasi Gerakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Setelah Dibubarkan Oleh Pemerintah Indonesia

Pasca dibubarkan keberadaannya oleh pemerintah Indonesia, hal tersebut tidak semata-mata membuat eks HTI menyerah untuk

terus melakukan aksi ‘perjuangannya’ dalam menyebarkan paham untuk menjadikan Indonesia menjadi negara islam. HTI ini telah bertransformasi identitasnya menjadi gerakan yang berbasis melalui internet, hal tersebut dilakukan agar pemerintah tidak dapat ‘mengendus’ gerakan baru yang mereka sedang upayakan (Setia & Rahman, 2021). Kegiatan dakwah, pengajian, seminar yang biasanya dilakukan secara langsung berubah menjadi dakwah yang dilakukan secara diam-diam melalui media sosial. Agenda-agenda yang sebelumnya sering dilakukan oleh HTI seperti diskusi di kampus, masjid, serta tempat lain kini beralih menjadi kegiatan *streaming* ataupun siaran langsung melalui berbagai *platform*, seperti *Youtube* dan *Instagram*.



Gambar 1. Akun instagram @indonesiabertauhidofficial, 2023.

Sebelumnya akun instagram dengan nama @indonesiabertauhidofficial merupakan akun utama yang digunakan oleh HTI untuk melakukan kampanye, penyebaran ajaran, dan mencari simpatisan masyarakat secara luas. Kini akun instagram tersebut tidak lagi menggunakan cara lama dan lebih membuat konten yang terlihat seperti ‘edukasi islam’ secara halus. Lalu kelompok yang menyebut dirinya sebagai Yayasan Indonesia Bertauhid ini telah disahkan kembali oleh Kemenkumham menjadi sebuah organisasi yang memiliki payung hukum serta legalitas yayasan, begitu pula dengan logo HTI lama, logo tersebut kini telah diganti dan sudah dilindungi serta didaftarkan kepada dirjen kekayaan intelektual Kemenkumham. Sehingga jika dilihat secara kasat mata, maka HTI sudah tidak ada lagi keberadaannya tetapi telah berganti nama menjadi Yayasan Indonesia Bertauhid.



Gambar 2. Akun instagram @yusanto_ismail, 2021.

Kelompok HTI juga memiliki cara lain untuk tetap eksis di kalangan masyarakat melalui publikasi sebuah film yang diproduksi oleh HTI itu sendiri dengan judul ‘Jejak Khilafah di Nusantara (JKDN)’. Film ini tidak menggunakan platform kebanyakan seperti *youtube*, *instagram*, dan *facebook* tetapi disebarluaskan melalui sebuah aplikasi pemutar film tertentu menggunakan tiket khusus/berbayar untuk menyaksikannya, sehingga pemerintah tidak bisa melakukan ancaman untuk memblokir tayangan film tersebut. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa film ini tidak fokus terhadap jejak khilafah melainkan lebih terfokus pada agenda penyebaran paham khilafah secara terselubung.



Gambar 3. Akun youtube @khilafahchannelreborn, 2023.

Usaha lain yang dilakukan oleh HTI dalam mempertahankan posisinya meski sudah

terpojokan yaitu dengan melalui platform *youtube*. Diketahui kelompok HTI telah memiliki beberapa kanal media yang berada di *youtube* seperti Media Ummat, Muslimah Media Center, Khilafah Channer, dan lain sebagainya. Seperti yang ditampilkan yaitu kanal *youtube* @khilafahcahnnelreborn, video-videonya berisi terkait ajaran-ajaran khilafah, dan orang-orang yang berada di dalam video tersebut seperti penceramah yang dihadirkan ialah para aktivis pendukung berdirinya khilafah seperti Ismail Yusanto yang dahulunya bertindak sebagai juru bicara HTI.

Pengaruh Ideologi dan Doktrin Khilafah yang Dianut Oleh Kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Dapat Mengancam Identitas Nasional dan Kedaulatan NKRI

HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) adalah sebuah organisasi politik Islam yang beroperasi di Indonesia. Organisasi ini mengikuti ideologi Hizb ut-Tahrir, sebuah gerakan politik Islam global. Tujuan HTI adalah untuk mendirikan khilafah Islam dan menerapkan hukum syariah di Indonesia. HTI mengalami perkembangan dalam beberapa tahap di Indonesia. Tahap pertama, yang dikenal sebagai "Tahap Hibernasi" (1980-1999), HTI beroperasi secara bawah tanah karena tekanan pemerintah. Tahap ini berfokus pada pelatihan dan pembinaan anggotanya. Tahap kedua, yang disebut "Tahap Pengembangan" (2000-2001), HTI mulai berinteraksi dengan masyarakat dan menggerakkan para pendukungnya. Tahap ketiga, yang dikenal sebagai "Tahap Eskalasi" (2002-2004), melibatkan protes, demonstrasi, dan tindakan kolektif lainnya untuk mempromosikan ideologinya (Hilmy, M. 2011). HTI menyebarkan ideologinya melalui berbagai publikasi, seperti buku-buku terjemahan, buletin, dan jurnal. Mereka juga menggunakan platform online untuk menyebarkan ide-ide mereka. HTI memperluas pengaruhnya melalui jaringan berbasis kampus yang dikenal sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) di universitas-universitas di seluruh Indonesia. Jaringan ini memungkinkan HTI untuk mencapai setiap provinsi di negara ini. Ideologi HTI mewakili bentuk Islam "sentrifugal", yang bertujuan untuk menyatukan identitas Islam nasional dan lokal di seluruh dunia di bawah otoritas khilafah Islam. Ideologi ini menentang konsep negara bangsa, yang dianggap mutlak di Indonesia.

Tantangan ini telah menyebabkan tuduhan terhadap HTI sebagai organisasi subversif yang memanfaatkan demokrasi. Akibatnya, wacana "Islam transnasional" menggelinding lebih luas, seakan membawa nuansa ideologis yang mengancam eksistensi organisasi keagamaan yang lahir dari perjuangan lokalitas keindonesiaan yang otentik.

Kelompok HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) telah menjadi perhatian bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia karena dianggap sebagai ancaman terhadap identitas nasional. HTI memiliki tujuan untuk mendirikan khilafah Islam dan menerapkan hukum syariah di Indonesia, yang bertentangan dengan konsep negara bangsa yang telah diakui dan dijalankan di Indonesia. HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) memang dikenal karena menolak pluralisme dan mengadvokasi ideologi yang eksklusif. Mereka berpendapat bahwa hanya Islam yang memiliki kebenaran mutlak dan bahwa sistem politik yang diakui hanya khilafah Islam. Pandangan ini bertentangan dengan konsep pluralisme yang mengakui dan menghormati keberagaman agama, budaya, dan pandangan politik dalam masyarakat.

Ideologi HTI yang mengusung konsep "Islam transnasional" dan menantang konsep negara bangsa dapat mengancam eksistensi identitas nasional Indonesia. HTI berusaha menyatukan identitas Islam nasional dan lokal di seluruh dunia di bawah otoritas khilafah Islam, yang dapat mengabaikan keragaman budaya, agama, dan identitas lokal yang ada di Indonesia. Selain itu, HTI juga dituduh sebagai organisasi subversif yang memanfaatkan demokrasi untuk mencapai tujuannya. Tuduhan ini muncul karena HTI menggunakan kebebasan berpendapat dan berorganisasi yang ada dalam sistem demokrasi untuk menyebarkan ideologi mereka yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk menghadapi ancaman dari HTI. Pada tahun 2017, pemerintah melarang HTI dan menyatakan organisasi ini bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Larangan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa HTI berpotensi mengganggu stabilitas negara dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam konteks ini, HTI dianggap sebagai ancaman terhadap identitas nasional Indonesia karena ideologi dan tujuannya yang bertentangan

dengan konsep negara bangsa dan keragaman budaya yang ada di Indonesia. Larangan terhadap HTI merupakan upaya pemerintah untuk melindungi identitas nasional dan mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi yang dijalankan di Indonesia.

Benturan ideologi antara Indonesia dan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dapat dilihat dalam konteks identitas nasional Indonesia dan tujuan HTI. HTI bertujuan untuk mendirikan khilafah Islam dan menerapkan hukum syariah di Indonesia, yang bertentangan dengan konsep negara bangsa dan keragaman budaya yang ada di Indonesia. Identitas nasional Indonesia didasarkan pada prinsip Pancasila, yang mendorong persatuan dalam keragaman dan mengakui keberadaan berbagai agama, budaya, dan etnis di negara ini. Ideologi HTI, di sisi lain, berusaha untuk menyatukan identitas Islam nasional dan lokal di seluruh dunia di bawah otoritas khilafah Islam tunggal, yang mungkin mengabaikan keragaman budaya dan agama di Indonesia. Benturan antara HTI dan identitas nasional Indonesia telah menyebabkan tuduhan terhadap HTI sebagai organisasi subversif yang memanfaatkan demokrasi. HTI dituduh menggunakan kebebasan berbicara dan berorganisasi dalam sistem demokrasi untuk menyebarkan ideologinya, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh HTI. Secara kesimpulan, benturan antara ideologi Indonesia dan HTI muncul dari tujuan dan prinsip yang saling bertentangan. Identitas nasional Indonesia, yang mendorong persatuan dalam keragaman, bertentangan dengan tujuan HTI untuk mendirikan khilafah Islam dan menerapkan hukum syariah. Dari beberapa aspek ideologi kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang bertentangan dengan identitas nasional Indonesia tersebut, dapat diketahui bahwa HTI dapat mengancam identitas nasional dan kedaulatan NKRI. HTI menolak dasar negara Pancasila, mengusung gagasan khilafah, menolak demokrasi, menganggap negara Indonesia sebagai negara kafir, dan mengajak umat Islam untuk berjuang melawan negara.

Menurut para aktivis HTI sangat yakin bahwa ideologi HTI siap disandingkan untuk menyaingi hingga menggantikan posisi ideologi

pancasila. Berdasarkan pada konsep transnasionalis islam maka terdapat proses transfer doktrin keagamaan ke HTI dari HT. Akan tetapi, dalam proses tersebut tidak terlihat adanya proses penyesuaian terhadap konteks yang disebut indonesianisasi. Melainkan, yang muncul lebih condong pada proses arabisasi (Hilmy, 2011). Salah satu doktrin yang ditularkan kepada HTI seperti cara berpakaian, yang mana mereka menganggap bahwa refleksi dari cara berpakaian umat islam yang autentik adalah seperti sebagaimana masyarakat Arab. Transfer doktrin yang terjadi sudah sangat meresap hingga ke dalam, tidak hanya di bagian luar tetapi menyentuh hingga ke ranah substantifnya. Melihat dari ideologi yang diyakini HTI, nyatanya menimbulkan kondisi politik dan sosial yang sempit memanas antara HTI dengan negara. Narasi politik dan sosial yang terbentuk pada saat itu yakni banyak membicarakan mengenai pergolakan yang terjadi antara HTI dan pemerintah akibat adanya perbedaan pandangan diantara kedua belah pihak. HTI kerap kali memanfaatkan akumulasi massa yang besar dalam menggerakkan mobilisasinya secara terbuka. Tidak jarang HTI beserta para pengikutnya terjun langsung ke jalan untuk menyuarakan keinginan dan tuntutan mereka. Sehingga, narasi narasi seputar upaya HTI yang ingin merebut legitimasi dari tangan pemerintah sangat tidak asing di masa itu terutama ketika sekitar tahun 2006 (Qohar & Hakiki, 2017).

Hal ini dikarenakan HTI mendapatkan semacam akses menuju pintu masuk ke dalam pemerintahan. Dimana HTI diakui oleh negara sebagai organisasi berbasis keagamaan dan merupakan gerakan dakwah yang berlandaskan pada pancasila. Tetapi, hal tersebut merupakan taktik licik yang dilakukan oleh HTI. Mereka sangat bersikeras dalam mengupayakan perwujudan Khilafah Islamiyah di Indonesia. Salah satu upaya yang paling menonjol dari HTI untuk mencapai tujuannya tersebut adalah penyelenggaraan *long mars* yang bertitik awal di monas kemudian bergerak menuju Senayan. Kegiatan tersebut ditujukan untuk menuntut pemerintah mengembalikan piagam jakarta sebagai sebuah konstitusi negara. Selain itu, HTI juga aktif dalam menyuarakan aspirasi mereka mengenai berbagai isu bahkan cukup memperhatikan isu global berbasis keagamaan. Misalnya, HTI pernah turun ke jalan untuk

mengecam agresi militer yang dilakukan Israel di Gaza. Melihat dari berbagai konflik yang terjadi di Indonesia maupun di berbagai negara, HTI sangat konsisten pada pandangannya yang menganggap bahwa Khilafah Islamiyah merupakan solusi yang solutif untuk menjawab semua persoalan yang ada (Syah & Setia, 2021). Isu keagamaan dan kebangsaan menjadi isu yang cukup krusial ketika HTI belum dibubarkan pemerintah. Karena HTI bersifat fundamental, maka isu keagamaan yang terjadi dimanapun akan sangat diperhatikan. Begitu juga dengan isu kebangsaan, HTI seolah tidak pernah kehabisan energi untuk terus menggemakan ideologi, pandangan, tuntutan, keinginan mereka kepada pemerintah untuk mengambil alih tatanan kenegaraan agar dapat segera menjalankan khilafah islamiyah. Pandangan-pandangan tersebut dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta mengancam kedaulatan negara. Oleh karena itu, tindakan pemerintah untuk membubarkan HTI dan menyingkirkan ideologi atau gagasan yang diusung organisasi tersebut merupakan langkah yang tepat untuk menjaga keutuhan negara dan identitas nasional Indonesia.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa transnasionalis mendeskripsikan adanya perpindahan gerakan kelompok islam yang bersifat transnasional. Kelompok islam transnasional terbentuk beralasan pada adanya kesamaan ideologi, pemahaman, atau keinginan yang sama dan bergerak lintas negara. Hizbut Tahrir (HT) merupakan gerakan transnasional islam yang berkembang pesat dengan keinginan untuk mendirikan kembali khilafah Islamiyah. Dalam kasus Indonesia, HTI muncul sebagai sebuah organisasi yaitu baru pada saat setelah terjadinya reformasi. Organisasi ini mengikuti ideologi Hizb ut-Tahrir, sebuah gerakan politik Islam global. Tujuan HTI adalah untuk mendirikan khilafah Islam dan menerapkan hukum syariah di Indonesia, yang bertentangan dengan konsep negara bangsa yang telah diakui dan dijalankan di Indonesia. HTI menyebarkan ideologinya melalui berbagai publikasi, seperti buku-buku terjemahan, buletin, dan jurnal. Mereka juga menggunakan platform online

untuk menyebarkan ide-ide mereka. Ideologi HTI yang mengusung konsep "Islam transnasional" dan menantang konsep negara bangsa dapat mengancam eksistensi identitas nasional Indonesia.

Untuk mewujudkan cita-citanya, HTI selalu menampilkan keberadaannya secara halus agar diterima oleh masyarakat yaitu dengan sosialisasi, kaderisasi, dan merebut kekuasaan. Untuk menjaga kesetiaan di antara para anggota serta simpatisannya, kelompok HTI ini secara rutin akan menggelar berbagai acara untuk menggambarkan fikrah serta thariqahnya. Pada kenyataannya kegiatan kelompok ini sangat bertentangan dengan kelima dasar dalam pancasila. Sehingga, Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM mencabut SK Badan Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada 19 Juli 2017. Sehingga secara sah dapat dikatakan bahwa HTI telah dibubarkan oleh negara. Pasca dibubarkan HTI mentransformasikan identitasnya menjadi gerakan yang berbasis melalui internet. kini beralih menjadi kegiatan *streaming* ataupun siaran langsung melalui berbagai *platform*, seperti *Youtube* dan *Instagram*. Melihat dari ideologi yang diyakini HTI, nyatanya menimbulkan kondisi politik dan sosial yang sempat memanas antara HTI dengan negara. Narasi politik dan sosial yang terbentuk pada saat itu banyak membicarakan mengenai pergolakan yang terjadi antara HTI dan pemerintah akibat adanya perbedaan pandangan diantara kedua belah pihak. Dengan demikian, kehadiran HTI di Indonesia mampu membuat identitas nasional menjadi terancam untuk digantikan dengan ideologi yang dipercayai oleh HTI.

DAFTAR PUSTAKA

- Binder, L. (1955). Al-Ghazali and Islamic Government. *The Muslim World*, 45(3), 229-241.
- Hayati, N. (2017). Konsep khilafah islamiyyah hizbut tahrir indonesia: Kajian living al-qur'an perspektif komunikasi. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 12(1), 169-200.
- Hanif, N. (2014). The securitisation of Hizb ut Tahrir. *A comparative case study*.

- Hilmy, M. (2011). Akar-Akar Transnasionalisme Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 1-13.
- Khatibah, K. (2011). Penelitian kepustakaan. *Iqra': Jurnal Perpustakaan dan Informasi*, 5(01), 36-39.
- Qohar, A., & Hakiki, K. M. 2017. Eksistensi Gerakan Ideologi Transnasionalisme HTI Sebelum dan Sesudah Pembubaran. *KALAM*. Vol 11(2).
- Setia, P., & Rahman, M. T. (2021). Kekhilafahan Islam, Globalisasi dan Gerilya Maya: Studi Kasus Hizbut Tahrir Indonesia. *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan*, 9(2), 241-264.
- Soetjipto, A. W., Yuliestiana, A. T. D., Suryani, D. P. S., Kinanthi, D. K., Tamzil, C. F., Parameswari, P., & Waworuntu, A. (2019). Transnasionalisme: peran aktor non negara dalam hubungan internasional. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syah., M. K. T., & Setia, P. 2021. Radikalisme Islam: Telaah Kampanye Khilafah oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Pra-Pembubaran oleh Pemerintah. *Jurnal Imam dan Spiritualitas*. Vol 1(4).
- BBCnews.com. (2017). Cabut SK Badan Hukum, Pemerintah Resmi Bubarkan HTI. Dikutip pada tanggal 23 September 2023, melalui link <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40651986>.

